

ABSTRAK

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 (BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.04/2020).

*(GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PUBLIC
COMPANIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC BASED ON
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER
16/POJK.04/2020.)*

Syarifah Indah Safitri

Corona Virus Disease-19 atau Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini menimbulkan dampak pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pada April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan terbaru terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian ini difokuskan pada RUPS Perusahaan Terbuka yang dilakukan dengan media elektronik berdasarkan POJK No. 16/POJK.04/2020 serta penguangan akta RUPS yang disusun melalui RUPS yang dilakukan secara elektronik menurut POJK No. 16/POJK.04/2020 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik dapat dilakukan secara sah dan akta RUPS yang dihasilkan dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pengadilan. Peraturan OJK ini menjadi penyelesaian terhadap permasalahan terkait penundaan RUPS dimana perusahaan tetap dapat berjalan pada masa darurat Covid-19.

Kata Kunci: RUPS, Perusahaan Terbuka, Notaris

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) issued the latest regulations regarding the General Meeting of Shareholders (GMS) of Public Companies. OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 is one of the steps taken by the government in preventing the spread of Covid-19. This research is focused on the General Meeting of Shareholders of Public Companies which were conducted with electronic media based on this POJK and the casting of the GMS deeds compiled through the GMS which were conducted electronically according to the OJK Regulations and the Law on Limited Liability Companies (UUPT). The research method used in this research is normative research with a statutory approach. An electronic GMS of a Public Company can be held legally and the resulting GMS deed can be used as legal evidence in court. This OJK regulation is a solution to problems related to postponement of the GMS where the company can continue to run during the Covid-19 emergency.

Keywords: *GMS, Public Company, Notary.*